

# Transformasi Ekonomi Sri Mulyani

Oleh Purwoko



6 WACANA

RABU, 23 OKTOBER 2019

**SUARA MERDEKA**  
Perekat Komunitas Jawa Tengah

SESAAT setelah bertemu Presiden Joko Widodo (22/10), Sri Mulyani menyampaikan dengan tegas dan jelas bahwa dirinya diminta oleh Presiden Jokowi untuk kembali menjadi Menteri Keuangan (Menkeu). Sri Mulyani menyatakan tugas utama yang diberikan Presiden Jokowi adalah menjaga ketahanan ekonomi melalui transformasi ekonomi.

Tugas Menteri Keuangan untuk periode 2019-2024 itu tidaklah mudah karena Indonesia sedang berada pada impitan dan tekanan ekonomi global yang tidak stabil dan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terlampaui berat. Apa langkah-langkah yang harus dilakukan Sri Mulyani untuk melakukan transformasi ekonomi?

Tumpukan utang yang mengunung, defisit APBN, inventasi yang terdegradasi, jeritan masyarakat atas isu kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, lapangan kerja yang menyempit dampak dari digitalisasi sistem kerja, beban kemiskinan yang harus dientaskan, dan masih minimnya pemberdayaan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Deretan masalah dalam negeri tersebut semakin berat tatkala kondisi ekonomi makro terpengaruh oleh kondisi ekonomi internasional yang tidak baik.

Sri Mulyani pernah mengatakan, salah satu penyebab perlambatan investasi karena ekonomi Indonesia masih belum efisien. Hal ini pun ditandai dengan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia (6%) masih di bawah angka ICOR negara-negara Asia seperti Tiongkok yang berada di atas 8%. ICOR merupakan rasio penambahan modal dengan penambahan pengeluaran. ICOR bisa menjadi salah satu parameter yang menunjukkan tingkat efisiensi investasi di suatu negara. Adapun faktor fundamental yang memengaruhi ICOR adalah sumber daya manusia (SDM). Dan Indonesia masih terkendala oleh masalah tingkat pendidikan yang relatif rendah dan keterampilan yang terbatas.

Hal itulah yang sebenarnya menjadi alasan Presiden Jokowi dalam periode jabatannya yang kedua memprioritaskan program pada penciptaan SDM unggul yang mampu berdaya saing global. Anggaran 20% APBN diluncurkan untuk pendidikan, anggaran Rp 495 triliun akan diopu-

Ekspor UMKM jenis makanan dan minuman telah memberikan kontribusi besar pertama pada ekonomi kreatif, yaitu sebesar 41,69%, fesyen sebesar 18,15% dan usaha furnitur dan kraf sebesar 15,70%. Padahal Indonesia memiliki sekitar 58 juta unit UMKM dan menyerap tenaga kerja sebesar 98,7%. Ini merupakan sektor yang harus dimaksimalkan perannya

malkan untuk menuntaskan masalah SDM. Dengan SDM yang memiliki kompetensi unggul Indonesia akan mampu memainkan pasar ekonomi yang memberikan keuntungan dan memiliki daya tahan terhadap guncangan ekonomi global.

## Transformasi UMKM

Berbagai upaya dilakukan Menteri Keuangan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, namun untuk beranjak dari angka 5,1% sangatlah berat.

Salah satu penyebabnya adalah belum maksimalnya upaya pemberdayaan ekonomi koperasi dan UMKM. Bank Indonesia (BI) mencatat posisi defisit transaksi neraca berjalan (*current account deficit/CAD*) Indonesia pada kuartal II (QII) 2019 melebar dari 7 miliar dolar AS pada triwulan sebelumnya menjadi 8,4 miliar dolar AS. Artinya, CAD Indonesia sudah menyentuh 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB) dari yang sebelumnya masih berada pada posisi 2,6%. Angka tersebut merupakan batas tertinggi CAD yang diproyeksikan pemerintah, yakni pada kisaran 2,5% hingga 3% PDB tahun ini.

Karena itu, Menteri Keuangan harus berani melakukan transformasi ekonomi untuk mengatasi defisit neraca perdagangan dengan mendorong kegiatan ekspor produk UMKM. Jangan lagi produk UMKM dianaktirikan karena peluang untuk mendorong ekspor UMKM masih terbuka lebar. Apalagi selama ini kontribusi UMKM terhadap ekspor nasional masih rendah, yaitu sebesar 15,80% atau sekitar 23 miliar dolar AS dari total ekspor nonmigas. Angka tersebut juga lebih rendah dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya seperti Vietnam 20% dan Thailand 29,50%.

Selain itu, Menteri Keuangan juga harus mendorong UMKM untuk mengembangkan industri pengolahan berbasis pertanian di perdesaan dengan mengolah hasil pertanian menjadi bahan olahan atau bahan jadi yang memiliki nilai jual lebih tinggi. Pengolahan bahan baku menjadi bahan olahan ini membutuhkan SDM yang unggul.

Ekspor UMKM jenis makanan dan minuman telah memberikan kontribusi besar pertama pada ekonomi kreatif, yaitu sebesar 41,69%, fesyen sebesar 18,15% dan usaha furnitur dan kraf sebesar 15,70%.

Pada hal Indonesia memiliki sekitar 58 juta unit UMKM dan menyerap tenaga kerja sebesar 98,7%. Ini merupakan sektor yang harus dimaksimalkan perannya.

Selain memperhatikan peningkatan kualitas SDM UMKM, Menteri Keuangan juga harus mentransformasikan masalah pembiayaan pada UMKM. Sebab, selama ini kucuran kredit yang diberikan kepada UMKM masih rendah.

Program yang dijalankan pemerintah melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) tidak tepat sasaran. Banyak terjadi di masyarakat, penerima KUR bukanlah pelaku UMKM, KUR justru dialokasikan untuk kegiatan konsumtif yang tidak produktif. (40)

—Dr Purwoko, dosen Magister Manajemen FEB Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta.

Kirimkan artikel wacana nasional ke: [wacana.nasional@gmail.com](mailto:wacana.nasional@gmail.com). Panjang maksimal 5.000 karakter dengan spasi, sertakan pasfoto pose santai. (Red)